

DARURAT CORONA SAH! LULUS SEKOLAH PAKAI RAPOR SAJA

Tahun ini bakal menjadi kali kedua dunia pendidikan Indonesia menjadikan rapor sebagai syarat kelulusan siswa sekolah. Darurat corona menjadi alasan kuatnya. Sebab, Ujian Nasional (UN), ujian kesetaraan hingga ujian sekolah memang tidak mungkin dipaksakan dilaksanakan saat pandemi Covid-19 belum juga bisa dikendalikan seperti saat ini. Bahkan rencana ideal, mengganti UN di tahun 2021 dengan sistem penilaian baru bernama 'asesmen kompetensi' harus ditunda akibat wabah. Dalam kondisi darurat, langkah ini memang wajar adanya. Tapi kemudian muncul pertanyaan, akankah kualitas pendidikan negeri ini juga menjadi korban corona? Sebelum pandemi terjadi peringkat mutu pendidikan Indonesia saja kurang bagus, bagaimana ke depan? Ah sudahlah, yang penting 'perang' melawan virus ini harus kita menangkan dulu.

Baca Hal 11

SYARAT KELULUSAN BAGI SISWA TINGKAT AKHIR ANTARA LAIN:

- Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan/program pendidikan setelah menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi Covid-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester.
- Peserta didik juga memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik.
- Peserta didik mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

OPSI UJIAN LAIN SEBAGAI PENGGANTI UN SEBAGAI SYARAT KELULUSAN

- Portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap/perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya (penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya).
- Penugasan.
- Tes secara luring atau daring.
- Bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.

Note : Untuk peserta didik sekolah menengah kejuruan dapat mengikuti uji kompetensi keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SUMBER: SE MENDIKBUD NO.1 TAHUN 2021



AS BILANG CORONA 'INGGRIS' LEBIH MEMATIKAN PEMERINTAH PASTIKAN BELUM MASUK RI

Jakarta - Varian baru Covid-19 yang berasal dari Inggris, B.1.1.7, ternyata tidak hanya lebih cepat menyebar dibanding varian yang biasa. Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (CDC) Amerika Serikat (AS) menyatakan data terkini mengindikasikan varian baru itu juga lebih berbahaya dan mematikan. Pemerintah Indonesia sendiri memastikan varian tersebut belum ditemukan di negeri ini. Semoga!

"Kami tahu bahwa varian baru COVID-19 meningkatkan penyebaran virus. Namun, ada peningkatan data yang menunjukkan varian B.1.1.7 kemungkinan meningkatkan angka kematian," ujar Direktur CDC, Rochelle Walensky, dikutip Kamis (04/02).

Walensky menegaskan bahwa temuan varian baru Covid-19 dari Inggris lebih berbahaya baru sebatas indikasi. Para peneliti, kata ia, masih meneliti data-data yang ada untuk memahami lebih jauh varian baru tersebut. Hal yang pasti, kata ia, dirinya akan mengacu sepenuhnya pada bukti sains.

Terakhir, Walensky menambahkan bahwa dari sejumlah penderita varian baru Covid-19 yang sudah diperiksa, kebanyakan tertular karena tidak memakai masker atau patuh jarak sosial. "Mungkin yang bisa kami katakan adalah varian baru Covid-19 ini tak kenal ampun jika kita tidak patuh protokol kesehatan," ujarnya mengakhiri.

Sebelumnya para peneliti dari Institute for Genomics and Evolutionary Medicines di Temple University di Philadelphia, Amerika Serikat juga menyebutkan jika virus corona sudah beredar sejak pertengahan Oktober 2019. Laporan tersebut sejalan dengan timeline pemerintah Cina yang baru terbuka di awal tahun 2020.

"Semua bukti menunjukkan jika virus berasal dari Cina. Pola penyebaran di dunia juga konsisten dengan penyebaran virus Cina di negara lain," kata salah satu peneliti, Sergei Pond, dikutip Mirror, Kamis (04/02).

Terpisah, Wakil Menteri Kesehatan dr Dante Saksono Harbuwono mengungkapkan



Masifnya testing Covid-19 serta pendisiplinan penerapan protokol kesehatan di Inggris patut dicontoh negara lain, termasuk Indonesia dalam mengatasi pandemi.

bahwa varian baru virus Corona yang ditemukan di Inggris, belum ditemukan di Indonesia. Hal ini diungkapkan setelah melakukan evaluasi di beberapa tempat di Indonesia.

"Mutasi yang kami evaluasi, sampai saat ini belum ada mutasi varian yang berasal dari UK (Inggris)," kata dr Dante.

Per Kamis (4/2), kasus bertambah 11.434 orang. Sehingga total kasus mencapai 1.123.105 orang. Pasien sembuh dari COVID-19 juga meningkat sebanyak 11.641 orang. Adapun kasus sembuh akumulatif berjumlah 917.306 orang. Sementara kasus kematian juga masih terus melonjak. Kini bertambah 31 orang sehingga total orang meninggal karena 31.001. corona.

Tekan Mobilitas

Wakil Ketua KPCPEN Luhut Pandjaitan menyebut satu syarat agar kasus corona di Indonesia bisa ditekan. Kuncinya di mobilitas masyarakat. "Berdasarkan pengalaman, dibutuhkan penurunan mobilitas di atas 30 persen untuk mengendalikan penambahan kasus, sehingga akan ada penyesuaian peraturan dan kebijakan akan hal ini," kata Luhut dalam rapat dengan para epidemiolog, Kamis (4/2).

Selain itu, Menko Kemaritiman dan Investasi itu juga mengatakan bahwa saat ini

manajemen data sedang dibenahi oleh Kementerian Kesehatan dengan target pertengahan Februari 2021.

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Dr. Hariadi Wibisono menegaskan bahwa testing dan tracing corona di Indonesia harus dibenahi. "Saat ini, dari sekian kasus penyebaran COVID-19, sebagian besar penularan tidak dapat terdeteksi asal dan usulnya. Sehingga, kebijakan 3T dalam testing dan tracing perlu ditingkatkan," usulnya.

Usulannya terkait testing yang terjangkau oleh masyarakat dari segi biaya dan jarak serta tracing melibatkan seluruh unsur masyarakat di tingkat kelurahan atau keluarga di bawah tanggung jawab dari pemerintah daerah setempat.

Di sisi lain, pakar epidemiologi UI Dr. Pandu Riono, menegaskan bahwa saat ini yang perlu ditingkatkan adalah kebersamaan dan kesadaran seluruh masyarakat dalam penyelesaian COVID-19.

"Usulan saya, pemerintah dapat bekerja sama dengan seluruh mitra terkait, baik dari skala besar ataupun kecil, atau juga mitra swasta untuk menekankan kepada masyarakat akan pentingnya penanganan pandemi Covid-19," ujarnya. (ist)

5 NEGARA ASIA TENGGARA MELAPORKAN TEMUAN VARIAN BARU CORONA INGGRIS B117

SEBARAN COVID-19

| | | | |
|------------------|---|----------------|--------------------------------------|
| 1,123,105 | TERKONFIRMASI + 11,434 KASUS | 917,306 | SEMBUH 81,7% DARI TERKONFIRMASI |
| 174,798 | KASUS AKTIF 15,6% DARI TERKONFIRMASI | 31,001 | MENINGGAL 2,8% DARI TERKONFIRMASI |

1. SINGAPURA

Singapura pertama kali melaporkan varian virus B117 pada 23 Desember silam. Kala itu kasus ditemukan pada warga negara asing yang datang dari Eropa alias kasus impor. Namun, belakangan ini otoritas Singapura melaporkan temuan kasus-kasus varian pada warga lokal. Arinya sudah terjadi infeksi di tingkat komunitas. Singapura sudah melaporkan total 25 kasus varian Corona B117 per tanggal 29 Januari 2021.

2. MALAYSIA

Pada tanggal 12 Januari 2021, Malaysia melaporkan kasus pertama varian baru virus Corona B117. Dikutip dari New Straits Times, satu orang pasien Covid-19 yang memiliki riwayat perjalanan dari Inggris dites positif varian baru Corona B117.

3. VIETNAM

Vietnam yang sempat dianggap berhasil mengendalikan pandemi kini harus kembali menghadapi lonjakan kasus Covid-19.

Kementerian Kesehatan Vietnam pada hari Selasa (2/2/2021), mengonfirmasi peningkatan kasus ini terjadi sebagian karena varian baru Corona yang sama seperti ditemukan di Inggris.

"Pengurutan genetik menunjukkan 12 dari 276 kasus baru pada pasien positif varian Inggris. Sumbernya masih belum diketahui jelas," kata Menteri Kesehatan Vietnam Nguyen Thanh Long.

4. THAILAND

Thailand menemukan kasus pertama B117 pada empat warga negara asing (WNA) asal

Inggris di awal bulan Januari 2021. Kementerian Kesehatan Thailand langsung bertindak dengan mengusulkan larangan masuk bagi WNA dari Inggris.

5. FILIPINA

Dikutip dari The Straits Times, Filipina melaporkan varian baru COVID-19 Inggris pada 13 Januari 2021. Kasus ditemukan pada seorang agen properti berusia 29 tahun yang baru saja melakukan perjalanan ke Uni Emirat Arab. Pada tanggal 24 Januari 2021, Filipina kembali melaporkan 16 kasus varian Corona tersebut.

Foto: AFP

BANJIR KECAMAN, AKHIRNYA PEMOTONGAN INSENTIF NAKES BATAL

Jakarta-Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperpanjang pemberian insentif tenaga kesehatan (nakes) di tahun 2021. Sayangnya, dalam surat Menteri Keuangan Nomor S-665/MK.02/2021 tentang permohonan perpanjangan pembayaran insentif bulanan dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan dan peserta PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis) yang menangani Covid-19 nominalnya lebih kecil dibanding tahun lalu.

Hal inipun langsung mendapat kecaman dari berbagai pihak termasuk para wakil rakyat. Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaon Daulay, menyangkan keputusan pemerintah menurunkan insentif nakes per orangnya sebesar 50 persen itu. Menurutnya, keputusan itu berbanding terbalik dengan situasi penyebaran virus Covid-19 yang semakin bertambah. Sehingga, wajar jika para nakes banyak yang merasa kecewa terhadap keputusan itu.

"Insentif tersebut hanya setengah dari insentif yang diberikan pada tahun 2020 lalu. Bagaimana pun juga, itu tentu sangat dirasakan dampaknya. Apalagi, para nakes kita saat ini bekerja siang malam dalam melayani masyarakat yang terpapar covid. Dapat dikatakan, mereka menyabung nyawa berdiri di barisan terdepan," katanya, Kamis (03/02).

Selain itu, kata dia, komisi IX mendesak agar kemenkes segera membayar insentif nakes yang belum dibayarkan tahun lalu. Berdasarkan informasi yang diterima komisi IX, kata dia, masih banyak insentif nakes yang belum dibayar. Bahkan, ada yang baru dibayar sampai bulan April. Hingga Bulan Mei-Desember 2020 belum dibayarkan.

Terpisah, Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati mengatakan, "Inikah cara pemerintah berterimakasih kepada tenaga kesehatan yang selama pandemi menjadi pahlawan tanpa tanda jasa? Pembayaran untuk tenaga kesehatan daerah masih

banyak tertunda dan tiba-tiba sekarang besaran insentif tenaga kesehatan diturunkan. Sungguh sangat tidak manusiawi," ujarnya.

Anggota Komisi IX dari Fraksi PDI Perjuangan Rahmad Handoyo juga turut mengomentari adanya pemotongan insentif nakes ini. Menurut Rahmad, dalam rapat terakhir yang digelar antara Kementerian Kesehatan dengan Komisi IX, terjadi kesepakatan agar insentif Nakes tetap dilanjutkan dan tidak ada pemotongan. Tetapi justru surat dari Kementerian Keuangan yang berisi nominal insentif yang mengalami penurunan menjadi tanda tanya besar.

"Pak Menteri Kesehatan berjanji akan berkomunikasi dengan Menteri Keuangan. Nah ini kan memprihatinkan berita ini karena disaat kasusnya belum terkendali kemudian banyak nakes yang gugur dalam pengendalian Covid-19, ada berita ini tentu menurunkan semangat dari para nakes kita," kata Rahmad.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Adib Khumaidi. "Ini adalah kebijakan yang kurang tepat. Apalagi saat ini para tenaga medis membutuhkan support dari semua pihak," ujar Adib dalam keterangan tertulisnya, Kamis (04/02).

Kemenkeu Tegaskan Tak Berubah

Terpisah, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan tidak ada pemotongan insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) yang menangani pasien Covid-19. Artinya insentif bagi nakes di tahun ini sama dengan tahun lalu.

Hal ini ditegaskan langsung oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani melalui konferensi pers virtual bersama dengan Kementerian Kesehatan, Kamis (04/02). "Saat ini belum ada perubahan insentif nakes, dengan demikian,



"Saat ini belum ada perubahan insentif nakes, dengan demikian, insentif tetap sama diberlakukan di 2021 ini, sama dengan diberikan di 2020."

**DIREKTUR JENDERAL
ANGGARAN KEMENTERIAN
KEUANGAN, ASKOLANI**

insentif tetap sama diberlakukan di 2021 ini, sama dengan diberikan di 2020," tegas Askolani.

Untuk memenuhi dana insentif ini, Kementerian Keuangan akan kembali melakukan refocusing anggaran di sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L). Sebab, penanganan Covid-19 dari sisi Kesehatan menjadi fokus utama pemerintah. "Ini sepenuhnya jadi prioritas pemerintah sehingga kemudian untuk dukung penanganan ini lakukan refocusing dan relokasi belanja banyak K/L," jelasnya. (ist,ins)

INSENTIF NAKES YANG BARU

(Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-665/MK.02/2021)

- Dokter spesialis menjadi Rp7.500.000 per orang per bulan
- Peserta PPDS sebesar Rp6.250.000 per orang per bulan.
- Dokter umum dan gigi Rp5.000.000 per orang per bulan.
- Bidan dan perawat Rp3.750.000 per orang per bulan.
- Tenaga kesehatan lainnya sebesar Rp2.500.000 per orang per bulan.

INSENTIF NAKES DI TAHUN 2020 LALU

- Dokter spesialis ditetapkan sebesar Rp 15 juta per orang per bulan.
- Dokter umum/dokter gigi Rp 10 juta per orang per bulan.
- Bidan atau perawat diberikan Rp 7,5 juta per orang per bulan.
- Tenaga medis lainnya Rp 5 juta per orang per bulan.

Foto: Sahlan Kurniawan/Lenteratoday



Warga duduk di antara puing-puing rumahnya yang ambruk akibat banjir bandang di Dusun Genuk Watu Desa Kepulungan, Gempol, Pasuruan, Jawa Timur, Kamis (4/2/2021).

Pasuruan- Dua orang meninggal karena hanyut akibat banjir bandang di Dusun Genuk Watu, Desa Kepulungan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jatim. Tak hanya itu 6 rumah rata dengan tanah akibat terseret banjir, 11 rumah mengalami kerusakan berat dan sebanyak 13 rumah mengalami kerusakan sedang.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur, menyebut penyebab banjir tak semata faktor limbah air sungai, tapi juga penurunan tanah memberi andil. "Semua pada tahu kalau tanahnya setiap tahun turun. Penurunan tanah itu terjadi sejak bencana lumpur Lapindo," kata Plt Kepala BPBD Jatim, Yanuar Rachmadi, Kamis (04/02).

Menurut dia, penurunan tanah dari tahun ke tahun terus terjadi. Ia mencontohkan tanah antara rel kereta api dengan jalan, jaraknya sudah ukuran meter. "Kayaknya penurunan tanah itu berlangsung terus menerus. Bahkan sekarang penurunannya sudah hampir dua

BANJIR BANDANG PASURUAN

MENELAN 2 KORBAN JIWA, BPBD: DIPICU LUAPAN SUNGAI DAN PENURUNAN TANAH

meter," ujar dia.

Yanuar menambahkan sepanjang tidak dilakukan upaya-upaya mengurangi penurunan tanah, banjir di Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, sulit diatasi. Bahkan, kata dia, meninggikan tanah sulit dilakukan, sebab butuh biaya besar.

"Solusi yang paling memungkinkan adalah relokasi. Tapi relokasi pun belum tentu semua mau. Di sana masih ada giat ekonomi, jadi masyarakat merasa banjir hanya bulan-bulan tertentu. Sehingga masyarakat lebih memilih bertahan," jelasnya.

Sebelumnya, banjir kembali menerjang Kabupaten Pasuruan. Banjir ini akibat luapan sungai setelah wilayah itu diguyur hujan lebat sejak pukul 18.00 WIB Rabu (03/02).

Saat banjir menerjang kawasan itu, dua warga diketahui bernama Sri Susminanti dan Nanda Sekar Arum, ditemukan tewas terseret banjir bandang yang terjadi di wilayah setempat pada Rabu petang.

Kepala Desa Kepulungan Didik Hartono ditemui di Pasuruan, Kamis, mengatakan korban ditemukan Kamis (04/02) sekitar pukul 06.00 WIB di dua lokasi yang berbeda. "Korban Susminanti ditemukan sekitar 1 kilometer dari tempat tinggalnya yang kini sudah rata dengan tanah," katanya di lokasi kejadian. Sementara Nanda Zeni Sekar Arum ditemukan di Dusun Tempel, Desa Legok.

Kepala Kepolisian Sektor Gempol Kumpul Kamran di lokasi mengatakan dari keterangan warga, dua korban saat kejadian sedang

duduk di teras rumah. "Dengan tiba-tiba air menggerus rumah mereka dari belakang dan menyeret korban hingga ditemukan tewas," katanya.

Pasuruan merupakan salah satu wilayah langganan banjir di Jawa Timur saat hujan lebat datang. Selain merendam ribuan rumah warga, banjir rutin biasanya juga menggenangi jalur pantai utara Surabaya-Banyuwangi. Dampaknya, jalur pantura Jawa Timur tersebut sering kali lumpuh.

Ada sembilan kecamatan di Kabupaten Pasuruan yang merupakan daerah rawan bencana banjir, yakni Grati, Winongan, Rejoso, Gondang Wetan, Kraton, Pohjentrek, Bangil, Beji, dan Gempol. Daerah-daerah tersebut paling rawan tergenang air karena lokasinya lebih rendah dari tempat lain dan tidak jauh dari pantai utara.

Selain itu, sembilan kecamatan tersebut juga menjadi muara empat sungai besar, yaitu Sungai Rejoso (di bagian timur), Sungai Welang (di wilayah Kraton), Sungai Kedunglarangan (di daerah Bangil), serta Sungai Wrati (di wilayah Beji dan Gempol).

Sungai Rejoso dan Welang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sedangkan Sungai Kedunglarangan dan Wrati menjadi kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas. Salah satu upaya mengatasi banjir di Pasuruan, secara bertahap, pemerintah daerah dan pusat sedang berupaya melakukan normalisasi sungai-sungai di sana. (wan,ist)

3 BENCANA ALAM TERJANG KABUPATEN BLITAR DALAM SEHARI

BLITAR-Cuaca ekstrem mengancam hampir diseluruh wilayah Indonesia. Di Kabupaten Blitar misalnya, dalam sehari saja ada 3 bencana alam berupa banjir bandang, puting beliung hingga tanah longsor yang menerjang.

Bahkan, banjir bandang yang terjadi di Dusun Jambangan, Desa Dawuhan, Kecamatan Kademangan mengakibatkan putusannya jembatan penghubung antar desa. Kondisi ini tentu saja membuat aktivitas warga terganggu.

"Jembatan tersebut menghubungkan Desa Dawuhan dengan Desa Bendosari dan Desa Suruhwadang," kata Staf BPBD Kabupaten Blitar, Lukman saat dikonfirmasi Kamis (04/02).

Untuk diketahui, Kabupaten Blitar sejak Rabu (03/02) siang sekitar pukul 13.00 WIB diguyur hujan deras, disertai angin kencang hingga terjadi puting beliung. Banjir bandang dan tanah longsor pun tak terelakkan di beberapa kecamatan. Diantaranya banjir bandang di Kecamatan Kademangan, puting beliung di Kecamatan Sanankulon dan

Bakung, serta tanah longsor di Kecamatan Sutojayan.

Sementara terkait, putusnya jembatan di Dusun Jambangan disebabkan ambruknya kaki jembatan saat banjir bandang menerjang. Sehingga jembatan sepanjang 20 meter dan lebar 5 meter, sisi sebelah utaranya patah atau ambruk ke dalam sungai.

Dampaknya warga 4 dusun yaitu Dusun Jambangan, Midodaren, Kaliandong dan Kelengkapan dengan jumlah sekitar 1.500 KK yang terdiri dari 3.000 jiwa. "Harus memutar ke jalur lain yang lebih jauh sekitar 7 kilometer, tapi aksesnya sulit," ungkapnya.

Sementara angin puting beliung juga terjadi di Desa Sumberejo, Kecamatan Sanankulon. Selanjutnya di Kecamatan Sutojayan, juga terjadi genangan air sekitar 20-30 cm hingga masuk ke rumah warga di Desa Sutojayan, Pandanarum dan Bacem.

Sesuai laporan Polsek Bakung dan Unit Turjawali Satlantas, yang diterima Polres Blitar. Dilaporkan adanya bencana puting beliung di Desa Pulerejo, Kecamatan Bakung sekitar jam 16.00 WIB. Sebanyak 8 rumah



Bencana alam berupa banjir bandang, puting beliung hingga tanah longsor menerjang Kab. Blitar dalam sehari.

warga mengalami kerusakan bagian atapnya, karena diterjang puting beliung yang terjadi beberapa menit. Seperti atap asbes terbang dan hancur ditiup puting beliung, serta genteng rumah yang rontok berjatuhan.

Kedelapan rumah warga tersebut, masing-masing milik Madi, Hero, Ibu Jarmi, Ibu Kaseh, Aning, Tohan dan Ali warga RT 02/RW 03 dan rumah Agus warga RT 05/RW 03. "Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian materi akibat kerusakan diperkirakan mencapai sekitar Rp 6,5 juta," kata Kasubag Humas Polres Blitar, AKP Imam Subechi. (ais)

BATASI MOBILITAS WARGA, SENTRA PKL DAN JALAN PROTOKOL SURABAYA **DITUTUP**

Surabaya- Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya melakukan penutupan sementara beberapa pusat keramaian seperti sentra Pedagang Kaki Lima (PKL) serta jalan protokol di Kota Pahlawan. Ini dilakukan untuk mengurangi mobilitas masyarakat dan mencegah terjadinya kerumunan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) jilid ke-2 ini.

Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Eddy Christijanto mengatakan, pusat keramaian yang dilakukan penutupan diantaranya Sentra PKL di Tugu Pahlawan Surabaya. Sentra PKL yang biasa buka pada Minggu pagi ini sudah dilakukan penutupan sejak Minggu, (31/01) lalu.

"PKL yang di Tugu Pahlawan itu sudah kita surati dan Minggu lalu dan sudah tidak ada kegiatan. Sampai nanti pelaksanaan PPKM (berakhir), atau tidak diperpanjang. Itu yang kami lakukan," kata Eddy di kantornya, Kamis (04/02).

Penutupan sementara juga dilakukan di PKL yang ada di sekitaran Masjid Agung. Sedangkan di kawasan Jembatan Suroboyo, penutupan dilakukan mulai Puskesmas Jenneran hingga Taman Suroboyo mulai pukul 05.00 WIB.

"Berikutnya informasi juga dari Kodam V/Brawijaya, itu (Pasar Malam Kodam) dilakukan penutupan sampai dengan tanggal 8 Februari 2021," ungkap dia.

Menurut Eddy, penutupan di pusat

keramaian ini dilakukan untuk mengurangi interaksi antar masyarakat dan terjadinya kerumunan pengunjung. Selama dilakukan penutupan, beberapa personel dari instansi terkait juga dikerahkan untuk melakukan pengawasan.

"Kita kerahkan semua personel dari Satpol PP, Linmas, Satpol kecamatan, serta jajaran Polres dan TNI," katanya.

Eddy mengungkapkan, penutupan sementara tak hanya dilakukan Satgas Covid-19 Surabaya di beberapa pusat keramaian. Namun, jalan protokol di Surabaya yang berpotensi menimbulkan kerumunan juga dilakukan penutupan. Salah satunya adalah Jalan Tunjungan dan Darmo Surabaya yang telah dilakukan penutupan sejak Senin (01/02) hingga Kamis (04/02) mulai pukul 22.00 - 05.00 WIB.

"Nanti juga di hari Jumat dan Sabtu, di Jalan Tunjungan dan Darmo tetap kita lakukan penutupan mulai jam 20.00 - 06.00 WIB," jelas dia

Sementara itu, Eddy menyebut, untuk Jalan Mayjend Sungkono dilakukan penutupan pada hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 22.00 - 06.00 WIB. Tujuannya adalah untuk menciptakan kawasan physical distancing dan membatasi mobilitas. Sebab, pada hari tertentu biasanya kawasan itu digunakan sebagai tempat berkumpulnya orang-orang atau komunitas.

"Karena kan dari hasil laporan (pemerintah pusat) protokol kesehatan pemakai-



Kepala Satpol PP Surabaya, Eddy Christijanto

an masker meningkat, kerumunan berkurang, tetapi mobilitas warga ini masih meningkat," terang mantan Kepala BPB dan Linmas Surabaya ini.

Lantas bagaimana untuk memantau mobilitas warga tersebut, Eddy pun menjelaskan, pantauan mobilitas masyarakat ini dapat dilakukan melalui masing-masing provider telepon. Melalui provider, mobilitas masyarakat dapat terpantau Bergeraknya kemana. Dari hasil pantauan itu tercatat jika pada saat jam-jam kerja, mobilitas masyarakat sangat tinggi.

"Jam 7 atau 8 pagi sampai dengan 19.00 malam mobilitas masyarakat sangat tinggi di Jawa dan Bali. Makanya untuk Surabaya beberapa lokasi kita lakukan physical distancing kawasan yang tidak bisa dilewati untuk mengurangi mobilitas masyarakat," pungkasnya. (Ard)

PENERAPAN ONE GATE SYSTEM DI KABUPATEN MADIUN TUI PRO-KONTRA

nya, mengeluhkan penjualannya menurun drastis semenjak diberlakukan one gate system. Dia menjadi tidak leluasa menjajakan dagangannya. "Jelas turun drastis. Kalau ditutup, terus mau jualan dimana. Kalau di jalan besar juga jelas nggak ada yang beli," jelasnya, Kamis (04/02).

Biasanya dalam sehari, Slamet mendapatkan paling sedikit Rp 100 ribu. Namun semenjak penerapan akses satu pintu, pendapatannya menurun 50 persen menjadi Rp. 50 ribu. "Ya kalau bisa kebijakannya jangan seperti ini. Kan masih ada protokol kesehatan," imbuhnya.

Berbeda dengan Slamet, penerapan akses satu pintu didukung beberapa warga lain. Lasmimi misalnya yang sehari-hari menjual rujak mengaku tidak keberatan ketika dilakukan one gate system. "Akses satu pintu ini efektif menghilangkan corona. Jualan saya baik-baik saja," pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi D, Djoko Setijono mengatakan penerapan tersebut

tidak efektif untuk menekan angka penyebaran Covid-19. Sebab, apabila hanya melakukan penutupan akses tetapi tidak diimbangi dengan penerapan protokol kesehatan, hanya akan menyebabkan ekonomi terhambat.

"Penanganan Covid ini. Kalau saya memberi masukan bahwa melibatkan institusi yang terendah ini yang penting. Apa itu, RT. Jadi RT ini kalau ada anggaran sedikit untuk mengawasi masyarakat sekitar," jelas Djoko. Bila memang dilakukan penerapan one gate system, juga harus ada sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga segala imbas positif-negatifnya bisa diketahui bersama-sama.

Untuk diketahui, Polres Madiun terus melakukan upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19, di wilayah Kabupaten Madiun salah satunya penerapan one gate system saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tahap kedua ini. (Ger)



Salah satu one gate system (akses satu pintu) di Desa Jiwan, Kabupaten Madiun.

MADIUN - Penerapan one gate system (akses satu pintu) di beberapa wilayah Kabupaten Madiun menuai banyak pro dan kontra. Langkah yang diambil guna menekan penyebaran virus Covid-19 ini dinilai memberikan dampak buruk bagi ekonomi, terutama masyarakat kecil.

Penjual es krim keliling, Slamet(48) misal-

CARA AMAN SAAT BEPERGIAN, LINDUNGI DIRI DARI VIRUS CORONA



Tetap aman saat bepergian adalah langkah yang harus terus dilakukan oleh para pelancong ketika harus bepergian meskipun kegiatan vaksinasi makin meluas.

Mengutip dari Mayo Clinic (Kamis, 28/1/2021), Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat merekomendasikan sejumlah langkah untuk melindungi diri sendiri dan orang lain saat Anda harus bepergian.

Pertama-tama adalah menjaga jarak sejauh 6 kaki atau 2 meter antara Anda dan orang lain. Sebisa mungkin jarak fisik antara Anda dan orang lain haruslah sejauh mungkin.

Kedua, hindari melakukan kontak dengan siapa pun yang sedang sakit. Batasi kontak dengan permukaan yang sering disentuh, seperti pegangan tangan, tombol elevator, dan kios.

Jika Anda harus menyentuh permukaan ini, maka gunakan pembersih tangan atau cuci tangan Anda sesudahnya.

Kemudian, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hindari juga menyentuh mata, hidung, dan mulut Anda. Tutupi ketika Anda batuk dan bersin.

Bersihkan tangan Anda sesering mungkin. Ini sangat penting terutama setelah pergi ke kamar mandi, sebelum makan, dan setelah batuk, bersin atau membuang ingus.

Sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air setidaknya selama 20 detik.

Jika sabun dan air tidak tersedia, maka gunakan pembersih tangan yang mengandung setidaknya 60 persen alkohol.

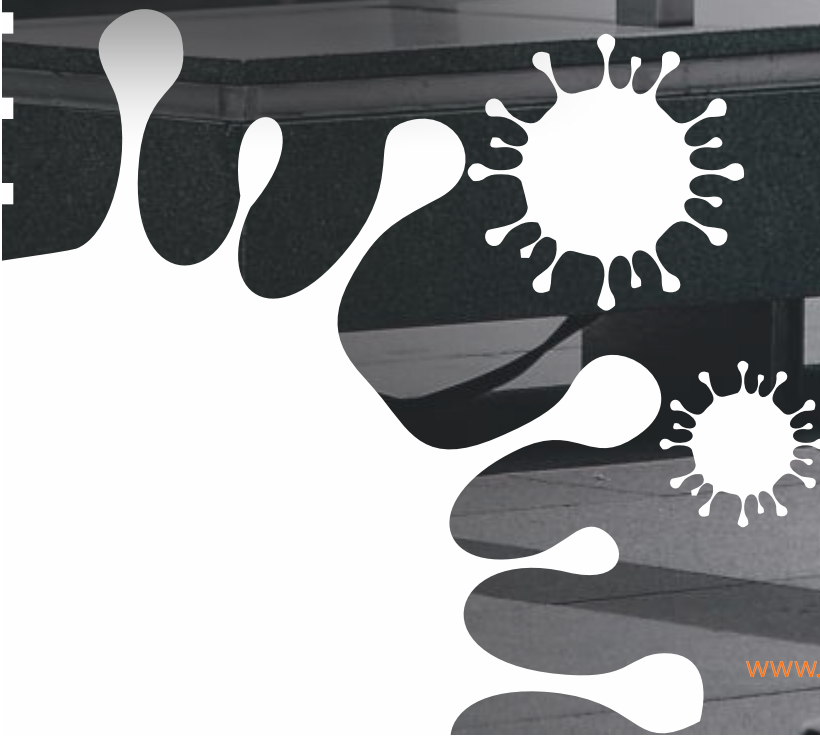
Tutupi semua permukaan tangan Anda dan gosokkan kedua tangan hingga terasa kering saat menggunakan pembersih tangan.

Selain itu, beberapa pemerintah negara bagian, lokal, dan teritorial memiliki persyaratan, seperti mewajibkan orang untuk memakai masker dan mewajibkan mereka yang baru bepergian untuk tinggal di rumah hingga 14 hari.

Persiapkan diri Anda dari kejutan dan penundaan yang tidak menyenangkan dengan memeriksa batasan di tempat tujuan Anda dan di mana pun Anda mungkin berhenti di sepanjang jalan.

Situs web departemen kesehatan negara bagian dan lokal adalah sumber daya terbaik Anda. Ingatlah bahwa batasan dapat berubah dengan cepat tergantung pada kondisi lokal.

Periksa kembali untuk pembaruan saat perjalanan Anda semakin dekat (Ist).



TIPS ISTIMEWA AGAR Bayi Baru Lahir BEBAS ANCAMAN COVID-19

Hari-hari dan minggu-minggu pertama setelah kelahiran bayi itu istimewa. Wajar jika Anda pasti ingin berbagi kegembiraan dengan keluarga dan teman. Tetapi Covid-19, flu, dan penyakit pernapasan lainnya membuat kunjungan virtual menjadi lebih penting dari sebelumnya. Hal ini harus dilakukan sebagai tindakan pencegahan ekstra bagi menjaga semua orang dari segala usia untuk tetap aman. Berikut ini tips bagi Anda untuk menjaga bayi Anda yang baru lahir dari ancaman virus Covid-19 atau penyakit pernapasan lainnya:

1. Batasi jumlah tamu yang datang ke rumah. Anda bisa menggunakan aplikasi seperti FaceTime, Skype, atau Zoom untuk keluarga dan kerabat yang ingin melihat bayi Anda.

2. Hindari orang yang sakit atau yang telah terpapar virus dan tinggallah di rumah sebanyak mungkin.

3. Jaga jarak - setidaknya enam kaki - antara Anda dan orang lain di luar rumah. Agar Anda tidak membawa virus ke rumah yang dapat membahayakan bayi Anda.

4. Tutupi batuk dan bersin Anda. Menggunakan siku adalah teknik yang bagus.

5. Gunakan air sabun panas atau mesin pencuci piring untuk mencuci piring atau peralatan bayi Anda.

6. Tutupi mulut dan hidung dengan kain penutup muka saat berada di sekitar orang lain. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS merekomendasikan bahwa setiap orang yang berusia 2 tahun ke atas harus mengena-kan penutup wajah dari kain yang menutupi hidung dan mulut mereka saat berada di tempat umum. Namun perlu diingat, memakai masker bukanlah pengganti tindakan preventif sehari-hari lainnya.

7. Jangan meletakkan penutup wajah dari kain pada bayi atau anak-anak di bawah usia 2. Pelindung wajah plastik untuk bayi baru lahir dan bayi juga tidak dianjurkan.

8. Cuci tangan Anda secara teratur dengan sabun dan air setidaknya selama 20 detik, atau gunakan pembersih tangan berbasis alkohol dengan setidaknya 60 persen alkohol.

Bayi hanya memerlukan dosis kecil antigen untuk pertahanan alami bayi Anda, serta untuk membantu anak Anda dengan aman membangun kekebalan terhadap penyakit. Namun, Anda harus berkonsultasi dengan dokter untuk memastikan vaksin yang aman untuk bayi Anda (Ist).



CARA MENGEMBALIKAN AKUN WHATSAPP SETELAH DIRETAS



Peretasan akun WhatsApp dapat menimpa siapa saja dan kapan saja. Pengambilalihan akun tanpa izin ini memiliki berbagai macam tujuan. Oleh karena itu penting untuk mengetahui cara merebut kembali akun WhatsApp yang telah diretas. Ada satu cara untuk mendapatkan kembali akun WhatsApp Anda. Namun hal ini harus dilakukan sesegera mungkin begitu mengetahui ada yang mengambil akun Anda tanpa izin. Mengutip dari berbagai sumber, berikut langkah-langkahnya:

1. INSTALL ULANG WHATSAPP

Segera uninstall aplikasi WhatsApp dari ponsel pintar yang Anda gunakan. Kemudian unduh dan install kembali aplikasi tersebut.

2. LOG IN

Setelah itu segera log in atau masuk aplikasi WhatsApp menggunakan nomor yang telah diretas.

3. MASUKAN KODE OTP

WhatsApp akan melakukan verifikasi akun dengan mengirimkan kode OTP melalui SMS ke nomor telepon

4. LOG OUT DARI PERANGKAT

Setelah berhasil menggunakan akun WhatsApp yang sebelumnya diretas, lakukan langkah berikutnya untuk memastikan tidak ada orang lain yang menggunakan akun Anda. Pilih icon bergambar tiga titik di pojok kanan atas, lalu pilih WhatsApp Web dan pilih log out from all devices.

5. VERIFIKASI DUA LANGKAH

Langkah terakhir setelah berhasil merebut kembali akun WhatsApp adalah berikat perlindungan ganda. Pilih icon bergambar titik tiga dan pilih setting atau pengaturan. Kemudian pilih account atau akun dan masuk ke two step verification atau verifikasi dua langkah. Di sini Anda akan diminta membuat pin dan menyertakan email (Ist).



Masker Alami

AGAR KULIT WAJAH GLOWING

Wajah cerah dan glowing memang menjadi goals banyak wanita saat ini. Untuk itu, berbagai carapun dilakukan untuk bisa mendapatkannya. Salah satunya dengan rutin merawat kulit atau yang lebih akrab disebut skincare-an. Skincare sendiri bisa didapatkan dari produk-produk yang siap pakai atau bisa dibuat sendiri menggunakan bahan alami. Nah, bahan alami sendiri punya banyak keunggulan karena terbebas dari bahan-bahan kimia dan lebih murah tentunya. Jika kamu tertarik melakukan perawatan kulit agar terlihat lebih glowing, masker alami bisa menjadi pilihan yang tepat. Dilansir dari berbagai sumber, berikut masker alami yang bikin kulitmu glowing :

PUTIH TELUR

Masker alami pertama yang bisa kamu coba adalah putih telur. Kandungan protein di dalam putih telur mampu meningkatkan pertumbuhan sel-sel kulit baru sehingga kulit meregenerasi lebih cepat. Semakin cepat regenerasi, maka sel-sel kulit mati penyebab wajah kusam akan tergantikan.

LIDAH BUAYA

Tanaman yang punya segudang manfaat ini juga bisa dijadikan masker alami untuk mendapatkan wajah cerah dan glowing. Adanya kandungan senyawa polifenol di dalam lidah buaya yang berfungsi sebagai antioksidan membuatnya mampu mencegah kekusaman kulit dan melindungi dari radikal bebas.

TOMAT

Buah dengan warna merah yang khas ini juga efektif untuk mencerahkan wajah dan membuatnya tampak lebih glowing. Tomat mengandung berbagai jenis vitamin yaitu vitamin A, B dan C serta tinggi antioksidan sehingga membuat kulit lebih sehat terawat dan ternutrisi. (Ist)

ALPUKAT

Buah yang terkenal dengan kandungan lemak baiknya ini juga bisa dijadikan masker untuk mendapatkan kulit yang cerah dan glowing. Kandungan antioksidan dan vitamin E di dalam buah alpukat mampu mencegah terjadinya penuaan dini sekaligus menutrisi kulit.

SUSU

Masker alami yang terbuat dari susu juga bisa kamu gunakan untuk mendapatkan wajah yang cerah dan glowing. Susu mengandung vitamin B6 dan B12 yang membantu mengontrol hiperpigmentasi sehingga kulit terhindar dari kekusaman. Selain itu, kandungan vitaminnya ini juga mampu menghidrasi kulit sehingga wajah lebih sehat dan kenyal.



Jokowi Kesal (dari hal 1)

Mendikbud Nadiem Makarim menerbitkan Surat Edaran (SE) Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian Sekolah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19).

Dikutip dari SE yang dikeluarkan pada 1 Februari 2021, Ujian Nasional (UN) dan ujian kesetaraan tahun 2021 ditiadakan. Dengan ditiadakannya UN dan ujian kesetaraan, maka UN dan ujian kesetaraan tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Peserta didik dinyatakan lulus setelah menyelesaikan program pembelajaran dibuktikan dengan rapor tiap semester, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik, dan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

Terpisah, Pengamat Kebijakan Pendidikan, Cecep Darmawan angkat bicara. Menurut dia, pertama dari sisi regulasi, sebenarnya ingin membatalkan UN jangan dilakukan melalui surat edaran, tapi harus oleh peraturan pemerintah atau PP, karena UN itu diatur oleh PP no 13 tahun 2015 yang didalamnya ada aturan soal UN.

"Nah, kalau ingin ditiadakan harusnya dicabut pasal UN nya di PP itu, jangan surat edaran, itu salah Kemendikbud. Walaupun ide penghapusan UN itu saya setuju, tapi cara dia cara mencabut UN nya tidak tertib hukum, lewat surat edaran itu salah, harusnya lewat revisi PP," ujarnya.

Menurut dia, UN itu memang dari dulu sudah kontroversial, karena tidak mengukur sesungguhnya potensi siswa, dan lebih banyak mengukur kognisinya saja. "UN itu bermasalah dari segi disparitas antara desa dan kota, sekolah-sekolah tertentu, dan mutu sekolah yang belum merata," ucapnya.

Pada 5 Januari lalu, Menteri Nadiem menjelaskan empat strategi utama Kemendikbud pada tahun 2021. "Pertama, pembangunan infrastruktur dan teknologi; kedua, penguatan kebijakan, prosedur, dan pendanaan; ketiga, penguatan kepemimpinan, masyarakat, dan kebudayaan; serta keempat, penguatan kurikulum, pedagogi, dan asesmen," jelasnya.

Mendikbud menegaskan, "semua kebijakan Kemendikbud berujung pada upaya menghadirkan transformasi yang bermakna dan membawa bangsa ini kepada kemajuan".

Untuk itu, prioritas Merdeka Belajar 2021 akan berfokus pada delapan prioritas. Pertama, pembiayaan pendidikan di antaranya Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dengan target 1,095 juta mahasiswa, KIP Sekolah dengan target 17,9 juta siswa, layanan khusus pendidikan masyarakat dan kebencanaan dengan target 42.896 sekolah, tunjangan profesi guru dengan target 363 ribu guru, dan pembinaan Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN), dan bantuan pemerintah kepada 13 SILN dan 2.236 lembaga.

Fokus selanjutnya pada Merdeka Belajar 2021 adalah program digitalisasi sekolah

dan medium pembelajaran melalui empat sistem penguatan platform digital, delapan layanan terpadu Kemendikbud, kehumasan dan media, 345 model bahan ajar dan model media pendidikan digital, serta penyediaan sarana pendidikan bagi 16.844 sekolah.

Sekolah Penggerak

Sementara itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga telah merilis Merdeka Belajar Sekolah Penggerak. Program ini merupakan kolaborasi antara Kemendikbud dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan SDM sekolah, pembelajaran, perencanaan, digitalisasi, dan pendampingan pemerintah daerah.

Rencananya, Sekolah Penggerak ini akan disiapkan sebagai sekolah yang akan menerapkan kurikulum yang sudah disederhanakan. Akan tetapi, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Paud Dikdasmen) Kemendikbud Jumeri menjelaskan bahwa yang di maksud bukan kurikulum baru.

"Jadi kita tidak mengenakan kurikulum baru, tapi kurikulum yang disempurnakan, itu akan diterapkan pada Sekolah Penggerak,"

jelas dia dalam Pendalaman Materi Merdeka Belajar Episode 7 secara daring, Kamis (04/02).

Sekolah Penggerak akan bertugas sebagai inisiator dalam menerapkan kurikulum yang disempurnakan. Setelahnya, hal tersebut akan diperbaiki. "Bukan uji coba, tapi penerapan terbatas. Kami itu dalam sistem sosialisasi Sekolah Penggerak itu menggunakan metode penerapan terbatas, kemudian di analisis dan keurangannya kita perbaiki, kurikulum ini diterapkan untuk Sekolah Penggerak, dari PAUD, SD, SMP, SMA sampai SLB. Ada penerapan terbatas dari kurikulum yang dirancang di 2020," jelasnya.

Terkait dengan kelulusan para murid yang tergabung di Sekolah Penggerak, kata Jumeri akan sama dengan sekolah lainnya, yakni menggunakan nilai yang diberikan para guru. Hal ini dilakukan karena Ujian Nasional (UN) telah ditiadakan.

"Itu nanti kelulusannya sama dengan lain, jadi untuk UN kan sudah ngga ada. Tahun ini dan tahun lalu, kelulusan itu nilai dari bapak ibu gurunya dan kesetaraan juga dari bapak ibu guru, itu sama, Sekolah Penggerak akan punya metode kelulusan yang sama dengan yang lain, tidak mengubah sistem kelulusan," urainya. (ist, ins)

8 POIN PENTING YANG TERCANTUM DI DALAM SE

1. Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan tahun 2021 ditiadakan.
2. Dengan ditiadakannya UN dan Ujian Kesetaraan pada angka 1, maka UN dan Ujian Kesetaraan tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
3. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah: Menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi Covid-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester. Memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik. Mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.
4. Ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dilaksanakan dalam bentuk: Portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap/perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya (penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya) Penugasan. Tes secara luring atau daring; dan/atau Bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
5. Selain ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 4. Peserta didik sekolah menengah kejuruan juga dapat mengikuti uji kompetensi keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penyetaraan bagi lulusan program Paket A, program Paket B, dan program Paket C dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kelulusan bagi peserta didik pendidikan kesetaraan sesuai dengan ketentuan pada angka 3 (tiga).
 - b. Ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan bagi peserta didik pendidikan kesetaraan berupa ujian tingkat satuan pendidikan kesetaraan diakui sebagai penyetaraan lulusan.
 - c. Ujian tingkat satuan pendidikan kesetaraan dilakukan dalam bentuk ujian sebagaimana dimaksud pada angka 4.
 - d. Peserta ujian tingkat satuan pada pendidikan kesetaraan adalah peserta didik yang terdaftar di daftar nominasi peserta ujian pendidikan kesetaraan pada data pokok pendidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
7. Kenaikan kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk siswa yang mengikuti ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk: a. Portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap / perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya (penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya).
 - b. Penugasan.
 - c. Tes secara luring atau daring atau bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
 - d. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh.
8. Untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan sesuai dengan Permendikbud Nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini atau dapat diunduh pada laman jdih.kemdikbud.go.id.





INDEKS DEMOKRASI 2020

INDONESIA CATAT SKOR TERENDAH

DALAM 14 TAHUN TERAKHIR

Jakarta - The Economist Intelligence Unit (EIU) baru saja merilis Laporan Indeks Demokrasi 2020. Dalam laporan tersebut menunjukkan Norwegia meraih skor tertinggi yakni 9,81 dan menjadikannya negara dengan indeks demokrasi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan Indonesia?

Indonesia menduduki peringkat ke-64 dunia dalam Indeks Demokrasi yang dirilis EIU dengan skor 6.3. Meski dalam segi peringkat Indonesia masih tetap sama dengan tahun sebelumnya, namun skor tersebut menurun dari yang sebelumnya 6.48. Indeks Demokrasi adalah sebuah indeks yang disusun oleh Economist Intelligence Unit (EIU) sejak tahun 2006, dengan tujuan untuk mengukur keadaan demokrasi di 167 negara di dunia.

Ini merupakan angka terendah yang diperoleh Indonesia dalam kurun waktu 14 tahun terakhir. Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan demokrasi cacat.

Menanggapi ini, Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute Karyono Wibowo mengatakan bahwa laporan ini harus menjadi cambuk bagi pemerintah Indonesia untuk memperbaiki pelaksanaan demokrasi.

Karyono berpendapat ke depan Indonesia masih akan menemui sejumlah tantangan, tetapi ia optimis indeks demokrasi Indonesia akan membaik jika kebijakan yang diambil pemerintah mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi.

"Pelaksanaan pemilu misalnya perlu diperbaiki. Sejumlah hambatan dalam pelaksana pemilu seperti money politic itu juga harus dicegah. Terkait dengan intimidasi dalam pelaksanaan pemilu juga harus dicegah...Kongkalikong antara penyelenggara pemilu dengan kontestan itu juga harus dihindari," ujar Karyono dikutip dari DW Indonesia, Kamis (04/02) siang.

Lebih lanjut Karyono mengatakan bahwa fenomena politik identitas menjadi salah satu indikator yang berperan penting dalam menurunnya indeks demokrasi Indonesia.

"Sejak tahun 2017 Pilkada DKI, kemudian terus berlanjut ke pilkada serentak sampai ke pemilu 2019. Bahkan Pilkada 2020 itu juga masih ada politik identitas yang digunakan sebagai instrumen politik dalam kontestasi elektoral," papar Karyono.

Bukan tanpa sebab Karyono memaparkan demikian. Dalam laporan tersebut menunjukkan bahwa tren indeks demokrasi Indonesia cenderung terus mengalami penurunan signifikan sejak tahun 2017.

Di kawasan Asia Tenggara, indeks demokrasi

Indonesia sendiri ada di peringkat empat, di bawah Malaysia, Timor Leste, dan Filipina.

Ada lima indikator yang digunakan EIU dalam menentukan indeks demokrasi suatu negara, antara lain proses pemilu dan pluralisme, fungsi dan kinerja pemerintah, partisipasi politik, budaya politik, serta kebebasan sipil.

Di Indonesia, EIU memberikan skor 7.92 untuk proses pemilu dan pluralisme. Sementara itu, fungsi dan kinerja pemerintah dengan skor 7.50, partisipasi politik 6.11, budaya politik 4.38, dan kebebasan sipil dengan skor 5.59.

Taiwan Jadi Bintang

Di posisi kedua ada Islandia dengan skor 9.37, disusul Swedia dengan skor 9.26, Selandia Baru dengan skor 9.25, dan Kanada dengan skor 9.24. Adapun negara dengan indeks demokrasi paling rendah adalah Korea Utara, dengan skor 1.08.

EIU menyebut secara global indeks demokrasi dunia menurun dibandingkan tahun lalu. Rata-rata skor indeks demokrasi dunia tahun ini tercatat 5.37, menurun dari yang sebelumnya 5.44. Angka ini pun tercatat sebagai rata-rata skor terendah sejak EIU merilis laporan tahunannya pada 2006 silam.

Berdasarkan skor yang diraih, EIU akan mengklasifikasikan negara-negara ke dalam empat kategori rezim: demokrasi penuh, demokrasi cacat, rezim hibrida, dan rezim otoriter.

Laporan juga menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 memberikan dampak kepada demokrasi dan kebebasan di dunia."Pandemi menegaskan bahwa banyak penguasa menjadi terbiasa mengecualikan publik dari diskusi tentang masalah-masalah mendasak saat ini, dan menunjukkan elit

pemerintah, bukan partisipasi populer, telah menjadi norma," ujar Joen Hoey penulis laporan EIU.

Secara khusus, EIU menyoroti kondisi indeks demokrasi Amerika Serikat (AS). Meski ada peningkatan di beberapa aspek, demokrasi di sana cenderung mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa peristiwa yang terjadi beberapa waktu belakangan. AS sendiri berada di peringkat 25 dunia dengan skor 7.29.

Politisasi pandemi virus corona, kebrutalan polisi dan ketidakadilan rasial, hingga pilpres akhir tahun lalu jadi penyebab menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan partai politik di negeri Paman Sam tersebut. Hal tersebut juga dinilai meningkatkan ancaman kebebasan berekspresi dan polarisasi di masyarakat.

"Presiden baru, Joe Biden, menghadapi tantangan besar dalam menyatukan negara yang sangat terpecah atas nilai-nilai inti," kata laporan itu.

Di sisi lain, peringkat indeks demokrasi Taiwan meningkat tajam dibandingkan negara lainnya. Taiwan bertengger di peringkat 11, atau naik 20 peringkat dari tahun sebelumnya. Kategori rezim di Taiwan juga berubah dari demokrasi cacat menjadi demokrasi penuh. EIU mengatakan bahwa hal itu ditunjukkan melalui pemilu yang diselenggarakan pada Januari 2020 lalu, di mana tingkat partisipasi masyarakat khususnya generasi muda menguat untuk memilih presiden dan anggota parlemen.

Sementara itu, Eropa barat kedatangan tinta merah dalam rapor tahunannya. Indeks demokrasi Prancis dan Portugal melorot dan masuk ke kategori rezim demokrasi cacat, menyisakan 13 negara yang masuk ke kategori demokrasi penuh di kawasan itu.(ist)

